

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian finansial merupakan keadaan dimana individu mampu membiayai kebutuhan pribadi dengan hasil usahanya sendiri. Hal ini sejalan dengan Perrone, dkk (2015, hlm. 198) yang mengungkapkan bahwa kemandirian finansial adalah suatu kondisi dimana individu menerima sumber penghasilan berkelanjutan sehingga tidak perlu lagi bergantung pada orang lain karena penghasilannya telah cukup untuk mendanai pilihan hidup yang diinginkan. Berdasarkan definisi tersebut, kemandirian finansial menjadi vital untuk dapat dicapai oleh setiap individu.

Arnett (dalam Xiao, Chatterjee, & Kim, 2014, hlm. 399) mengungkapkan bahwa kemandirian finansial sangat penting bagi kehidupan seseorang, baik secara individual maupun sosial. Secara individual artinya dengan kemandirian finansial seseorang dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti makanan, transportasi, dan kesehatan. Kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan primer yang perlu dipenuhi. Jika tidak, seseorang tidak dapat hidup dengan layak. Sebagai contoh, saat seseorang tidak memiliki penghasilan untuk membeli makanan sebagaimana mestinya, maka orang tersebut akan sangat rentan untuk terserang penyakit atau mengalami gizi buruk (Hutagalung, 2016, hlm. 73). Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya kemandirian finansial secara individual.

Secara sosial, dapat dikatakan bahwa orang dewasa yang mandiri secara finansial berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat yang sejahtera (Xiao, Chatterjee, & Kim, 2014, hlm. 5). Masyarakat sejahtera yang dimaksud adalah masyarakat yang terbebas dari bantuan pemerintah, seperti bantuan langsung uang tunai (BLT), program beras miskin (Raskin) subsidi, program keluarga harapan

1

1

**Asep Rudi Irawan , 2013 LAYANAN TRANSISI DALAM
RANGKA MENYIAPKAN KEMANDIRIAN FINANSIAL SISWA
TUNAGRAHITA RINGAN DI SLBC PURNAMA ASIH BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
| perpustakaan.upi.edu

(Lamangida, 2016, hlm. 194) atau santunan tiap bulan bagi penyandang disabilitas (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013, hlm. 75). Semakin banyak orang yang mandiri secara finansial, maka semakin sedikit bantuan yang perlu diberikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan individu yang mandiri secara finansial telah mampu membiayai kehidupan personal mereka.

Salah satu cara untuk mencapai kemandirian finansial adalah bekerja. Yusuf (dalam Rusdiansyah & Sujarwanto, 2013, hlm. 5) menyebutkan bahwa tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan gaji, tetapi beberapa orang yang bekerja lebih mungkin hanya untuk kepuasan batin. Seseorang dapat bekerja sebagai karyawan, membuka usaha sendiri, atau bahkan keduanya (Urwin, 2011, hlm. 11). Meski demikian, umumnya individu mengawali karir sebagai karyawan. Hal ini didukung dengan data bahwa pada Agustus 2014, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai sebesar 252,7 juta jiwa, di mana 121,9 juta di antaranya menjadi bagian dari angkatan kerja (ILO, 2015, hlm. 9).

Tunagrahita perlu mandiri secara finansial untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari dan berpartisipasi dalam masyarakat sebagaimana orang pada umumnya. Tunagrahita (*Persons with Intellectual Disabilities*) sendiri merupakan kondisi yang terjadi pada sekitar 1 persen populasi yang mengalami defisit dalam fungsi adaptif sehari-hari, disebabkan oleh defisit fungsi intelektual yang signifikan, dan hal tersebut terjadi selama periode perkembangan (American Psychiatric Association dan DSM-5 Task Force, 2013, hlm 33). Kondisi ini tidak menghilangkan hak mereka untuk bekerja. Sejalan dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pasal 27 yang menyatakan,

Recognizes the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labor market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities (United Nation, 2006. hlm 17)

Konvensi tersebut mengungkapkan bahwa setiap orang berkewajiban mengakui hak para penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan. Namun, pekerjaan bagi anak tunagrahita (ATG) seringkali sangat terbatas dan rentan terhadap pemecatan oleh perusahaan (Ishi & Yaeda, 2010, hlm. 15). Meski ada opsi untuk memiliki usaha sendiri (*business owner*), tetapi pada akhirnya ATG memerlukan orang dewasa untuk menjadi *leader* utama dalam usaha yang mereka lakukan (WHO & World Bank, 2011, hlm. 232). Dengan

demikian, mereka tetap menjadi karyawan dengan tambahan status sebagai pemilik usaha (*self-employed*).

Masalah kemandirian finansial bagi ATG masih cukup mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kuantitas dan kualitas ATG untuk bekerja pada lapangan pekerjaan kompetitif (*competitive employment*). Didukung *Tracer study* yang dilakukan oleh Rusdiansyah & Sujarwanto (2013, hlm. 2) pada 26 ATG yang lulus tahun 2013 dari 17 SLBC Di Sidoarjo dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.1 Hasil *Tracer Study* Lulusan SLB C di Sidoarjo tahun 2013

No	Status	Jumlah	(%)	Jenis Pekerjaan	Cara mendapatkan pekerjaan
1	Mendapat pekerjaan	7 orang	27%	<ul style="list-style-type: none"> • Mengemas kerupuk di pabrik, 1 orang (4%). • Menjaga warnet, 1 orang (4%). • Membuat keset dari bahan kain perca di sekolah, 1 orang (4%). • Petugas parkir, 1 orang (4%). • Tenaga kebersihan di sekolah, 3 orang (11%). 	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui orangtua • Melalui orangtua • Melalui sekolah • Melalui orangtua • Melalui sekolah
2	Tidak mendapat pekerjaan	19 orang	73 %	Hanya beraktifitas di rumah	

Sumber : Rusdiansyah & Sujarwanto (2013, hlm. 2)

Studi tersebut melaporkan bahwa mereka yang mendapatkan pekerjaan mampu melaksanakan tugas, namun bermasalah pada aspek kedisiplinan, motivasi kerja dan *responsibility*. Sementara yang tidak mendapatkan pekerjaan, kembali ke rumah dan bergantung pada orang tua mereka. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa orangtua

sering mengeluh mengenai sampai kapan anak mereka menggantungkan hidup pada orangtua.

Kuantitas ATG yang minim untuk dapat bekerja tidak hanya terjadi di Sidoarjo namun juga di Bandung. Didukung pernyataan ketua Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Bandung, Atalia Praratya, "Saat ini, belum mencapai satu persen. Karena itu diperlukan kesiapannya secara menyeluruh, baik dari penyandang disabilitas maupun perusahaannya," (dalam Harian Republika, 2016). Adapun data lengkap tentang tunagrahita yang telah memperoleh pekerjaan di Bandung masih belum ditemukan dalam literatur. Mengenai hal ini, hanya ditemukan penelitian yang bersifat *case study*.

Penelitian Mastiani (dalam Seva & Mahmudah 2017, hlm. 3) misalnya, mengenai program keterampilan kerja mengemas produk pertanian bagi tunagrahita ringan kelas XI di SLB Sukagalih, Lembang Bandung Barat, menemukan bahwa anak tunagrahita ringan mampu mengerjakan pekerjaan yang bersifat *semi-skill*, seperti pekerjaan mengemas produk pertanian. Penelitian tersebut juga melaporkan bahwa pekerjaan yang dikuasai dan disenangi oleh ATG menjadi faktor yang membuat mereka tekun bekerja serta membuat penyedia lapangan pekerjaan bersedia menerima anak tunagrahita untuk bekerja di tempat tersebut. Namun, dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa hanya 1 dari 5 lulusan yang dapat bekerja. Hal tersebut dikarenakan 1 orang yang mendapat pekerjaan memiliki akses ke tempat kerja.

Selain itu, studi pendahuluan yang dilaksanakan di SLB C, Cipaganti menemukan bahwa sekolah tersebut telah menjalin relasi dengan beberapa dunia kerja seperti KFC dan Asosiasi petani sayuran dan ladang Cihideung sehingga setelah lulus sekolah, beberapa ATG bisa bekerja disana. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan adanya layanan transisi, dapat membuka peluang lebih besar untuk mencapai *rate employment* bagi ATG yang lebih tinggi.

Layanan transisi menurut Munawir Yusur, dkk (dalam Nanda, dkk, hlm. 559) adalah program persiapan bagi ABK agar memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setelah masa pendidikan formal yang disiapkan sejak mereka berada di bangku sekolah. Barron, dkk (2014, hlm -) pada laman <http://www.intellectualdisability.info/life-stages/articles/transition-for-children-with-intellectual-disabilities> menyebutkan bahwa kebutuhan hidup ATG paska pendidikan formal mencakup kebutuhan finansial, kesehatan, dan sosialisasi. Layanan transisi perlu dilaksanakan sebagai upaya agar ATG mampu memenuhi berbagai kebutuhan tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, layanan transisi yang dimaksud difokuskan dalam rangka menyiapkan ATG agar mampu memenuhi kebutuhan finansial setelah masa pendidikan formal.

ATG perlu disiapkan untuk memasuki dunia kerja dengan adaptif sehingga dengan bekerja ATG dapat mandiri secara finansial. Parmenter (2011, hlm. 46) menyebutkan bahwa layanan transisi dalam rangka menyiapkan ATG ke dunia kerja yang baik adalah layanan yang sesuai kebutuhan ATG untuk bekerja. Berbagai literatur melaporkan bahwa kebutuhan ATG dalam hal bekerja adalah kebutuhan untuk menentukan nasibnya sendiri / *self determination* (Wagner, dkk, 1990, hlm. 5-2), kebutuhan akan akses ke dunia kerja/ *access* (WHO & WB (2011, hlm.236), kebutuhan akan pemahaman bersama / *mutual understanding* (WHO & WB, 2011, hlm. 240), kebutuhan akan dukungan pemerintah, serta kebutuhan akan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan (Aihara dalam Nobutaka & Kazufumi, 2012. hlm. 47).

Dengan demikian, sekolah dan pemerintah perlu menyediakan layanan transisi bagi ATG dengan memperhatikan kebutuhan ATG dalam bekerja. Hal tersebut sejalan dengan ILO & WHO (2011, Hlm. 242) yang melaporkan bahwa *rate employment* bagi ATG yang cukup tinggi di berbagai Negara, terletak pada efektifitas layanan transisi selama masa pendidikan formal yang dilakukan sekolah dan dukungan kerja (*supported employment*) yang akomodatif sesudah masa pendidikan formal yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu bagian terpenting dalam mengatasi permasalahan ATG dalam mendapatkan pekerjaan adalah diperlukannya kondisi yang lebih baik dari usaha sekolah dalam menyiapkan tunagrahita siap bekerja melalui layanan transisi (*transition service*). Selain itu, diperlukan usaha pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan transisi paska sekolah ke dunia kerja. Artinya, sekolah dan pemerintah perlu bekerjasama menyediakan layanan dengan cara mengoptimalkan fungsi dan wewenangnya masing – masing.

Layanan transisi ke dunia kerja yang seyogyanya disediakan pemerintah adalah *work agencies, job training, supervision, dan placement*. Layanan tersebut adalah layanan yang krusial dalam rangka membantu ATG untuk dapat memperoleh pekerjaan dan bekerja dengan adaptif (ILO & WHO, 2011, Hlm. 242). Namun, layanan tersebut belum tersedia di semua daerah di Indonesia. layanan transisi sesudah lulus sekolah menuju dunia kerja baru sebatas pelatihan tahunan yang isidental (Rusdiansyah & Sujarwanto, 2016, hlm. 2).

Ditinjau dari tujuan pendidikan formal bagi ATG, yakni untuk menyiapkan mereka mandiri setelah lulus sekolah (Kemendikbud, 2012), termasuk yang sangat penting yakni mandiri secara finansial, maka hal ini menuntut sekolah dapat menyediakan layanan transisi yang sesuai kebutuhan ATG untuk bekerja. Secara umum, Mumpuniarti, dkk (2014, hlm. 104) menjelaskan bahwa keunggulan sekolah di berbagai daerah adalah keseriusan mereka dalam mengajarkan keterampilan tertentu. Dalam perspektif pendidikan vokasional dengan definisi terbatas, hal ini bisa dianggap cukup, namun jika memakai perspektif yang lebih luas – *transition support system* – hal ini masih dianggap kurang. Sebab, ada kompetensi, tahapan karir, pembelajaran karir, dan kemitraan yang harus disiapkan untuk sampai tunagrahita mendapatkan pekerjaan dan bekerja dengan adaptif (Mumpuniarti, dkk, 2014, hlm. 104).

Meninjau layanan transisi di SLB C Purnama Asih, secara umum dapat ditemukan bahwa pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana pandangan di atas. Berdasarkan studi pendahuluan, terdapat beberapa permasalahan umum dalam implementasi layanan transisi di sekolah tersebut yang penting untuk segera diselesaikan. Hal ini ditinjau dari usaha sekolah dalam memenuhi kebutuhan ATG untuk bekerja. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Kebutuhan ATG untuk menentukan nasibnya sendiri,** sekolah belum melibatkan anak dalam berbagai keputusan, seperti dalam rapat pembahasan IEP. Hal ini membuat ATG seringkali tidak memahami hambatan dan potensi pada dirinya sendiri. Dimana pemahaman ini berguna bagi ATG untuk menentukan nasibnya sendiri. Selain itu, penggunaan metode ceramah satu arah yang dominan membuat ATG tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menyampaikan aspirasi, persepsi, dan apresiasi. Dimana hal tersebut dibutuhkan agar ATG memiliki motivasi yang baik untuk bekerja. Didukung penelitian Ifa (2014, hlm. 74) yang menyatakan bahwa penggunaan metode ceramah yang dominan dapat menghambat munculnya aspirasi pada ATG.
- 2. Kebutuhan akan akses ke dunia kerja,** sekolah belum sepenuhnya menjalin kemitraan dengan berbagai tempat kerja. Padahal, menjalin kemitraan dengan dunia kerja dapat memberikan akses kepada ATG untuk pemasaran produk, program magang, maupun penempatan kerja (Ishartiwi, 2010, hlm. 25).

3. **Kebutuhan akan pemahaman bersama**, guru belum optimal dalam melakukan asesmen perkembangan anak, rapat membahas kondisi aktual anak belum terlaksana secara rutin (*IEP Meeting*), dan belum menjalin komunikasi dengan dunia kerja untuk mensosialisasikan keadaan anak. Kondisi ini dapat memicu perspsi negatif dari lingkungan bahwa ATG tidak mampu bekerja. Sebagaimana hasil penelitian Seva & Mahmudah (2017, hlm. 8) menunjukkan bahwa seringkali tunagrahita tidak mendapatkan peluang kerja pada bidang tertentu karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat dan orangtuanya sendiri.
4. **Kebutuhan akan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan**, persiapan karir terbatas pada pelatihan kejuruan/ vokasional tanpa penyesuaian dengan kompetensi yang dibutuhkan lapangan kerja dapat menyebabkan ketidaksiapan ATG untuk bekerja baik secara mental maupun keterampilan (Ishartiwi, 2010, hlm. 25). Hal ini yang masih menjadi masalah di SLB C purnama Asih, dimana program vokasional dan pembiasaan yang mengarah pada motivasi kerja tidak berjalan sehingga dikhawatirkan ATG tidak siap bekerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi penting untuk mengeksplorasi secara lebih komprehensif tentang bagaimana implementasi layanan transisi bagi ATG di SLB C Purnama Asih. Sehingga dapat dianalisis potensi dan hambatan yang terjadi dari implementasi layanan tersebut. Hal ini berguna bagi penentuan kebijakan maupun perencanaan kedepan. Didukung pernyataan bahwa segala kebijakan sebaiknya berdasar pada kondisi faktual dilapangan yang diperoleh berdasarkan penelitian (UNCTA, WTO, ITC, 2006. hlm.3).

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada layanan transisi dalam rangka menyiapkan kemandirian finansial siswa tunagrahita ringan di SLBC Purnama Asih, Bandung. Secara operasional, fokus masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebutuhan ATG di SLBC Purnama Asih agar dapat mandiri secara finansial?

2. Bagaimana layanan yang diberikan sekolah dalam memenuhi kebutuhan menentukan nasib sendiri bagi ATG?
3. Bagaimana layanan yang diberikan sekolah dalam membantu ATG memiliki akses ke dunia kerja?
4. Bagaimana layanan yang diberikan sekolah dalam mempromosikan pemahaman bersama terkait ATG pada orangtua dan dunia kerja?
5. Bagaimana layanan yang diberikan sekolah dalam memenuhi kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja?

Adapun kebutuhan akan dukungan pemerintah tidak menjadi masalah yang dilibatkan dalam penelitian ini dikarenakan hal tersebut diluar kapasitas sekolah. Sementara penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana usaha sekolah SLBC Purnama Asih dalam menyiapkan tunagrahita agar dapat memperoleh pekerjaan dan bekerja dengan adaptif.

Dalam pelaksanaannya, sekolah yang dimaksud dibatasi pada bagaimana layanan yang diberikan oleh guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan layanan transisi untuk tunagrahita ringan. Adapun seting dalam penelitian ini dibatasi pada seting kelas 2 tingkat SMALB C.

Seting tersebut dipilih dan dibatasi berdasarkan tiga alasan. Pertama, seting perlu dibatasi untuk efisiensi waktu dan dana. Kedua, seting dipilih karena berbagai penelitian tentang pendidikan karir telah merekomendasikan bahwa tingkat SMA adalah masa dimana tunagrahita sebaiknya dibekali pendidikan yang lebih fokus pada kepentingan mereka untuk bekerja. Kedua, berdasarkan kurikulum 2013, kelas 2 tingkat SMALB C adalah masa dimana siswa tunagrahita mengenal pekerjaan dan profesi melalui pembelajaran tematik. Berdasarkan tiga hal tersebut, peneliti berpandangan bahwa penelitian tentang layanan transisi ini akan lebih tepat dilakukan pada seting kelas 2 SMALB C.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian Secara Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi layanan transisi dalam rangka menyiapkan kemandirian finansial siswa tunagrahita ringan di SLBC Purnama Asih, Bandung.

b. Tujuan Penelitian Secara Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah

- 1) Mendeskripsikan kebutuhan ATG di SLBC Purnama Asih agar dapat mandiri secara finansial.
- 2) Mendeskripsikan kondisi objektif layanan yang diberikan sekolah dalam memenuhi kebutuhan menentukan nasib sendiri bagi ATG.
- 3) Mendeskripsikan kondisi objektif layanan yang diberikan sekolah dalam membantu ATG memiliki akses ke dunia kerja.
- 4) Mendeskripsikan kondisi objektif layanan yang diberikan sekolah dalam mempromosikan pemahaman bersama terkait ATG pada orangtua dan dunia kerja.
- 5) Mendeskripsikan kondisi objektif layanan yang diberikan sekolah dalam memenuhi kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini berupa gambaran deskriptif tentang implementasi layanan transisi paska sekolah. Hasil tersebut dapat berguna bagi banyak pihak, terutama peneliti, guru, dan sekolah.

a. Bagi Peneliti

Dapat menghasilkan gambaran permasalahan, potensi dari implementasi layanan transisi sehingga dapat berguna untuk perkembangan penelitian berikutnya. Terutama penelitian survey yang membutuhkan teori dasar.

b. Bagi Guru

Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini bisa menjadi bahan masukan yang berarti bagi aktifitas belajar mengajar yang dilakukan, baik oleh guru SLB C maupun guru yang memegang ATG pada setting pendidikan inklusif.

c. Bagi Sekolah

Gambaran permasalahan dan potensi dari implementasi layanan transisi berguna sebagai bahan pertimbangan kebijakan sekolah kedepannya.